

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan wilayah dapat diartikan sebagai proses pengarahan pada kegiatan pembangunan di suatu wilayah yang melibatkan sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Perencanaan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis antara satu wilayah sangat berbeda dengan wilayah lainnya. Peningkatan perekonomian harus diimbangi adanya pemerataan pembangunan pada setiap wilayahnya. Peningkatan perekonomian dapat dilakukan melalui penggunaan sumber daya secara optimal sehingga terjadi perkembangan perekonomian. Salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*).

Pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*) merupakan salah satu pendekatan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi difokuskan pada daerah yang memiliki potensi tinggi dan fasilitas wilayah yang lebih memadai untuk mempercepat terjadinya persebaran kemajuan ekonomi. Sjafrizal (2012) menjelaskan bahwa, karakteristik sebuah pusat pertumbuhan yaitu : 1) adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu, 2) konsentrasi kegiatan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; 3) terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut, 4) dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut. Menurut undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Adanya industri disuatu wilayah akan mewujudkan keberadaan pusat pertumbuhan. Keberadaan pusat pertumbuhan bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan (kutub-kutub pertumbuhan) melalui potensi yang dimiliki oleh

daerah setempat. Keunggulan yang dimiliki oleh daerah dikembangkan untuk membantu ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama rumah tangga yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga masyarakat dapat hidup layak di daerahnya dengan memberikan bekal pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi menghasilkan produk yang berkualitas dengan efisiensi dalam memproduksi. Hasil produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar diwilayahnya dan dapat pula diandalkan jadi komoditi ekspor keluar wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu dukungan sarana dan prasarana, infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, listrik, sarana transportasi yang mendukung, fasilitas komunikasi, pelayanan sosial, kelembagaan yang memadai. Tujuan utama dari dukungan infrastruktur ini adalah agar hasil produksi yang dibuat oleh rumah tangga dapat di distribusikan ke pasar dengan mudah. Mengingat sebagian besar hasil produk di daerah adalah produk hasil peternakan yang tergolong tidak tahan lama dan membutuhkan waktu yang cepat sampai ke pasar agar kualitasnya tidak menurun.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Perroux (1955) dalam Sjafrizal (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi (*agglomeration economies*) yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi. Keuntungan aglomerasi ini akan menjadikan suatu kawasan antara berbagai usaha yang tergabung di dalamnya yang merupakan ikatan yang kuat dalam kawasan. Sehingga pada tahap selanjutnya akan mendorong pula peningkatan efisiensi harga dan produksi dalam kegiatan ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional.

Provinsi Sumatera Barat terbagi atas beberapa tipologi Berdasarkan struktur dan perkembangan Kabupaten/Kota. Pengelompokan tipologi berdasarkan laju pertumbuhan dan PDRB perkapita tahun 2018 yaitu; daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah cepat berkembang, dan daerah relatif tertinggal. Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan sebagai daerah maju karena mempunyai laju pertumbuhan PDRB dan tingkat PDRB perkapita berada diatas rata-rata daerah. Sedangkan Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten

Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh termasuk kedalam daerah yang relatif maju tapi tertekan karena memiliki pendapatan perkapitanya relatif tinggi, tapi laju pertumbuhan ekonomi daerah lebih rendah dari rata-rata keseluruhan daerah (Marta, 2018). Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat dikelompokkan sebagai daerah yang sedang berkembang karena mempunyai laju pertumbuhan PDRB relatif tinggi, namun pendapatan perkapita masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan daerah. Sedangkan daerah yang dikelompokkan sebagai daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Daerah ini mempunyai tingkat PDRB perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari rata-rata seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat (Marta, 2018).

Kabupaten Pasaman termasuk kedalam tipologi daerah relatif tertinggal. Dimana laju pertumbuhan Kabupaten Pasaman hanya senilai 5,78 persen. Nilai ini lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten di Sumatera Barat yaitu 5,91 persen. Kabupaten Pasaman juga memiliki PDRB perkapita lebih rendah yaitu 22.523.753 rupiah. Nilai ini juga lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten di Sumatera Barat yaitu 28.016.941 rupiah. (BPS Sumbar, 2019). Oleh sebab itu diperlukan penentuan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pasaman agar dapat memacu perkembangan wilayah sehingga terjadi pemerataan perekonomian pada setiap kecamatan. Melalui pemusatan pertumbuhan pada suatu daerah tertentu, maka akan terjadi penyebaran keuntungan ekonomi pada daerah sekitarnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menetapkan Kabupaten Pasaman sebagai kawasan agropolitan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030. Supaya implementasi kebijakan pengembangan sektor pertanian mencapai optimal, maka perlu memilih prioritas pengembangan sub sektor pertanian yang dianggap menjadi basis komoditi Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman memiliki struktur perekonomian yang didominasi sektor pertanian yang memiliki banyak komoditi pertanian dalam arti luas, dari komoditi bahan makanan, perkebunan, perikanan, sampai peternakan.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pasaman tahun 2015-2019 bahwa kontribusi sub sektor peternakan masih rendah dibandingkan dengan sub sektor lain. Adapun peranan peternakan terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pasaman tahun 2019 adalah 3,04% (BPS Kabupaten Pasaman, 2020). Hal ini menandakan bahwa subsektor peternakan di Kabupaten Pasaman masih perlu ditingkatkan. Lambatnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasaman salah satu penyebabnya adalah tidak didukungnya perkembangan sektor industri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lewis (2011), bahwa pembangunan ekonomi terjadi apabila terjadi perubahan struktur dalam penyumbang perekonomiannya yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman perlu untuk mengembangkan sektor industri didalam mendukung sektor pertanian terutama industri peternakan. Industri peternakan adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku seperti hijauan, butiran, ternaknya sendiri untuk menghasilkan produk peternakan seperti daging, telur dan susu, serta hasil olahannya. itu semua termasuk dalam industri peternakan.

Permasalahan dalam industri peternakan di Kabupaten Pasaman masih cukup rumit. Pada industri unggas penyediaan bibit dan pakan masih tergantung impor. Pada industri ruminansia besar, sumber bibit yang mengandalkan usaha peternakan rakyat tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, dan industri pakannya belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur dan perdagangan ternak hidup tanpa kendali berpeluang penyebaran penyakit dan tidak terjaminnya kualitas dan keamanan produk. Dari sisi konsumsi, terjadi senjang penawaran dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari impor. Di sisi lain, kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi, hanya permintaannya sangat tergantung pada daya beli konsumen, dan keamanan produk. Untuk mengatasi permasalahan diperlukan strategi pembangunan yang fokus dan tepat sasaran meliputi komoditas dan wilayah yang akan dikembangkan.

Komoditas peternakan yang berkembang di Kabupaten Pasaman adalah ternak Ruminansia (sapi potong dan kerbau), ruminansia kecil (domba dan kambing), dan Unggas (ayam dan itik). Perkembangan populasi komoditi peternakan di Kabupaten Pasaman tahun 2019 dibandingkan dengan populasi

tahun 2015. Komoditi ternak ruminansia mengalami kenaikan populasi pada sapi potong, kerbau dan kambing masing –masing sebesar 3,61 persen, 6,53 persen dan 6,35 persen. Untuk komoditi ternak unggas juga mengalami peningkatan pada ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging dan itik masing-masing 1,52 persen, 4,16 persen, 4,79 persen dan 6,28 persen.(BPS Pasaman, 2020).

Kecamatan yang mempunyai jumlah populasi ternak terbesar, sapi potong di Kecamatan Tigo Nagari sebanyak 351 ekor , Kerbau di Kecamatan Rao Utara sebanyak 334 ekor, dan Kambing di Kecamatan Rao Utara sebanyak 386 ekor, Sedangkan untuk jumlah populasi terbesar ternak unggas, ayam buras di Kecamatan Bonjol sebanyak 18.848 ekor, Ayam Ras Petelur di Kecamatan Lubuk Sikaping sebanyak 3.780 ekor, Ayam Ras Pedaging di Kecamatan Rao Selatan sebanyak 24.104 ekor dan Itik/itik Manila di Kecamatan Rao Selatan sebanyak 23.071.(Lampiran 1 dan 2). Potensi yang ada ini masih belum dapat digarap secara optimal karena disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan atau skill yang dimiliki dalam memproduksi barang dan jasa, kurangnya modal, skala usaha yang kecil, akses pasar yang belum terbuka, tingginya biaya produksi sehingga sulit bersaing dengan produk yang sama.

Adisasmita (2008) menyatakan pusat pertumbuhan (growth pole) tidak terjadi di segala tempat, tetapi hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu, yang mempunyai berbagai intensitas yang berbeda-beda. Lalu menurut Nugroho (2012) jika ditinjau secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yg memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*). Salah satu cara untuk menentukan pusat pertumbuhan adalah melalui potensi suatu daerah dengan melihat keberadaan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan komoditas peternakan. Selain itu, untuk mendukung pembangunan sub sektor peternakan di Kabupaten Pasaman adalah dengan mengetahui komoditas peternakan yang menjadi unggulan.

Komoditi unggulan daerah diartikan sebagai komoditas yang mempunyai daya saing tinggi. Suatu komoditas dikatakan unggul apabila memiliki keuntungan komperatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditi yang sama di daerah lain. Penentuan komoditi unggulan sangat penting artinya untuk menentukan prioritas pengembangan komoditi peternakan menjadi lebih jelas,

konkrit dan terarah (Sofina, 2018). Dengan adanya komoditas unggulan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan daerah. Komoditi unggulandi Kabupaten Pasaman dapat dilihat melalui potensi untuk dapat mengeskpor barang atau jasa yang diproduksi. Terjadinya ekspor barang dan jasa akan tercipta suatu hubungan interaksi pada beberapa wilayah, seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah di Kabupaten Pasaman (Oksatriandhi, 2010). Interaksi yang terjadi dapat menggambarkan hubungan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterlandnya* di Kabupaten Pasaman. Tujuannya akhirnya adalah mencari wilayah mana yang menjadi pusat pertumbuhan dan dapat memberikan dampak desentralisasi bagi kecamatan lain di Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul : “**Pusat Pertumbuhan Industri Peternakan Di Kabupaten Pasaman**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Kecamatan manakah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan pengembangan peternakan di Kabupaten Pasaman.
2. Apa sajakah komoditi unggulan peternakandi Kabupaten Pasaman.
3. Bagaimana pertumbuhan komoditi unggulan peternakan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman.
4. Bagaimana interaksi tingkat keterkaitan antara pusat pertumbuhan (*growth centre*) dengan daerah sekitarnya (*hinterland*).
5. Bagaimana implikasi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Kabupaten Pasaman melalui komoditi unggulannya.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan pembangunan peternakan di Kabupaten Pasaman
2. Mengidentifikasi komoditi unggulan peternakan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pasaman.
3. Mengidentifikasi pertumbuhan komoditi unggulan peternakan yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman.

4. Mengidentifikasi interaksi (tingkat keterkaitan antara pusat pertumbuhan

(growth centre) dan daerah sekitarnya *(hinterland)*.

5. Menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman melalui komoditi-komoditi unggulannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota terutama dalam membuat perencanaan pembangunan peternakan.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pembangunan terutama dalam hal potensi.

